# ANALISIS KEDALAMA KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2018




**Oleh:**

**Nama : Bedika Sadewa**

**Nomor Mahasiswa : 14313361**

**Program Studi : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

# ANALISIS KEDALAMA KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2018

Disusun guna memenuhi syarat ujian akhir

Program Studi Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia


Oleh:

Nama : Bedika Sadewa

Nomor Mahasiswa : 14313361

Program Studi : Ilmu Ekonomi


**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

# LEMBAR PENGESAHAN

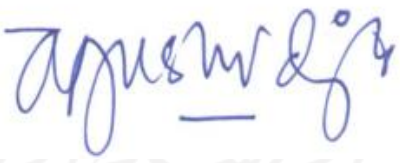
Analisis Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018

| | |
|---|---|
| Nama | : Bedika Sadewa |
| NomorMahasiswa | : 14313361 |
| Program Studi | : Ilmu Ekonomi |

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Agus Widardjono, Drs.,M.A., Ph.D.

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Penulis




Bedika Sadewa

# BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KEDALAMAN KEMISKINAN DI PROINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2018**

Disusun Oleh : **BEDIKA SADEWA**

Nomor Mahasiswa : **14313361**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 10 Januari 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Agus Widarjono,Drs.,M.A., Ph.D.

Penguji : Diana Wijayanti,,S.E., M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, karena dengan syafaatnya kita dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang di ridhoi Allah SWT.

Penelitian yang berjudul "Analisis Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018". Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan laporan penelitian penulis banyak kelemahan maupun kekurangan, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penilitian ini bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Penulis,



Bedika Sadew

# DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..... 1

DAFTAR ISI ..... i

DAFTAR TABEL ..... x

BAB I ..... 1

PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Rumusan Masalah ..... 5

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 5

BAB II ..... 6

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ..... 6

2.1. Kajian Pustaka ..... 6

2.2. Landasan Teori ..... 8

2.2.1. Kemiskinan ..... 8

1. Pengertian Kemiskinan ..... 8

2. Penyebab Kemiskinan ..... 9

2.2.2. Pengeluaran Pemerintah (Belanja Modal) ..... 12

1. Pengaruh Variabel Belanja Modal Terhadap Kedalaman Kemiskinan 12

2.2.3. Tingkat Pengangguran ..... 13

1. Pengaruh variable tingkat pengangguran terhadap kemiskinan ..... 15

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... 16

1. Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Kemsikinan..... 17

2.3. Hipotesis Penelitian..... 17

BAB III ..... 18

METODOLOGI PENELITIAN..... 18

3.1. Jenis dan Sumber Data ..... 18

3.2. Teknik Pengumpulan Data ..... 19

3.3. Definisi Operasional Variabel ..... 19

3.3.1. Kedalaman Kemiskinan (Y) ..... 19

3.3.2. Belanja Modal (X1) ..... 19

3.3.3. Tingkat Pengangguran (X2)..... 20

3.3.4. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (X3) ..... 20

3.4. Model Metode Analisis ..... 20

3.4.1. Estimasi Regresi Data Panel..... 21

3.4.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel ..... 26

3.5. Pengujian Statistik..... 27

3.5.1. Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)..... 27

3.5.2. Uji F (Kelayakan Model)..... 28

3.5.3. Uji T..... 29

BAB IV ..... 31

HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 31

4.1. Deskripsi data ..... 31

4.2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel ..... 31

4.2.1. Hasil Estimasi Model *Common Effect* ..... 32

4.2.2. Hasil Estimasi Model *Fixed Effect* ..... 32

4.2.3. Hasil Estimasi Model *Randoom Effect* ..... 33

4.3. Pemilihan Model Regresi ..... 34

4.3.1. Uji Signifikansi *Fixed Effect* (Uji Chow) ..... 34

4.3.2. Uji Hausman ..... 35

4.4. Pengujian Statistik ..... 36

4.4.1. Koefisien determinasi ($R^2$) ..... 37

4.4.2. Uji Serempak (Uji F) ..... 37

4.4.3. Uji Parsial (Uji T-Statistik) ..... 38

4.5. Analisis Ekonomi ..... 40

4.5.1. Persamaan Estimasi dengan Intersep ..... 40

4.5.2. Pengaruh Constanta Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ..... 41

4.5.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ..... 41

4.5.4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ..... 42

4.5.5. Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ..... 43

BAB V ..... 44

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI ..... 44

5.1. Kesimpulan ..... 44

5.2. Implikasi ..... 45

DAFTAR PUSTAKA ..... 47

LAMPIRAN ..... 50

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. 1 Kemisikinan di Pulau Jawa 2015** ..... 2

**Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif** ..... 31

**Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Model Comment Effect** ..... 32

**Tabel 4. 3 Hasil Estimasi Model Fixed Effect** ..... 32

**Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Model Randoom Effect** ..... 33

**Tabel 4. 5 Uji chow dengan Redundant Test** ..... 34

**Tabel 4. 6 Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman** ..... 35

**Tabel 4. 7 Hasil Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Model Fixed Effect** ..... 36

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial (Uji T-statistik)** ..... 38

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Adapun permasalahn di negara berkembang yang terletak di benua Asia seperti Indonesia, kemiskinan adalah suatu permasalahan yang sering menjadi pembahasan klasik di seluruh kalangan masyarakat. Kemiskinan bisa dikatakan seperti layaknya lingkaran setan dimana tingkat pendidikan, kesehatan, produktifitas., kesejahteraan masyarakat rendah dengan pendapatan yang kecil, dan tingkat pengangguran dianggap sebagai suatu permasalahan yang saling mempengaruhi dalam lingkaran kemiskinan yang intinya secara kuantitatif, kemiskinan merupakan keadaan di mana taraf hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan nya jauh darikata cukup.

Pembangunan merupakan suatu proses agar saling keterkaitan dan berkesinambungan antara faktor-faktor yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Arsyad, 2004). Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan. Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dilaksanakannya pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi

berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pembangnan ekonomi harus dilakukan pembangunan daerah secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut(Todaro & Smith, 2006).

Berbagai daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun presentasenya. Keadaan demografis, jumlah penduduk, hingga kebijakan daerah masing-masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi berpenduduk miskin terbanyak di Indonesia, hal tersebut didorong oleh banyaknya jumlah populasi penduduk. Sedangkan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah yaitu pengangguran, pendidikan, dan PDRB Per Kapita.

**Tabel 1. 1 Kemisikinan di Pulau Jawa 2015**

| Provinsi | Presentase (%) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | 3,61 | 369 |
| Jawa Barat | 9,57 | 4486 |
| Jawa Tengah | 13,32 | 4506 |
| DI Yogyakarta | 13,16 | 486 |
| Jawa Timur | 12,28 | 4776 |
| Banten | 5,75 | 691 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah*

Dari data diatas, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sedangkan dari jumlah penduduk miskin, Jawa Tengah berada diurutan kedua setelah Jawa Timur dengan 4.506.000 (empat juta limaratus enam ribu) penduduk miskin. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang sangat tinggi, menunjukkan masih belum optimalnya upaya pemerintah dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat dalam segi pembangunan.

Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi pula. Secara ekonomi, pengangguran mempengaruhi daya saing dan daya beli masyarakat sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan (Rahmawati, 2016). Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, maka daya beli masyarakat akan rendah, sehingga memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kesehatan, pangan dan tempat tinggal yang menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Hal ini menunjukkan berpengaruhnya tingkat penganguran terhadap kemiskinan.

Upaya meningkatkan pembangunan dan menurunkan tingkat kemiskinan taklepas dari peran pendidikan. Pentingnya pendidikan di suatu wilayah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan perkapita dan juga pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.

Pendidikan merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Untuk mengurangi tingginya kemiskinan perlu diketahui berbagai faktor yang berhubungan dan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Pendidikan merupakan salahsatu cara yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Bank Dunia, 2016).

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah tinggi rendahnya PDRB per kapita pada suatu daerah. Ketika PDRB per kapita tinggi artinya terdapat pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta pemungutan pajak yanglebih besar sehingga memungkinkan pemerintah dapat berbuat lebih bagi masyarakat miskin (Wirawan, 2015).

Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menerapkan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang ada di Jawa Tengah tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang "**Analisis Kedalaman Kemiskinan di Proinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018"**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita terhadap kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Belanja Modal Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kedalaman kemiskinan di jawa tengah.
3. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per kapita terhadap kedalaman kemiskinan di jawa tengah.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

## 2.1. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengacu dari beberapa peneletian terdahulusebagai proses menemukan kekurangan/kelemahan dari peneliti yang lalu. Sehingga dapat dijelaskan mana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian ini dengan penelititan sebelumnya. Penelitian Susanti (2013) yang meneliti mengenai pengaruh PDRB, Pengangguran dan Indeks Pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat menunujukan bahwa PDRB secara parsial memepunyai pengaruh positif yang signifikan. Secara parsial Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat dan IPM mempunyai pengaruh negative daan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

Penelitian Amalia (2012) yang menganalisis megenai Pengaruh Pengangguran, Pendidkan dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia KTI) Periode 2001-2010 menunujukan bahwa variable pengangguran dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Peneltian Astrini (2013) yang menganalisis tentang PDRB, Pendidkan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali menunjukan bahwa laju pertumbuhan PDRB, angka melek huruf dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh sugnifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Sedangkan secara parsial laju pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Angka melek huruf berpengaruh signifikan negative dan signifikan terhadap kemiskinan secara parsial. Kemudian tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkatkemiskinan di Provinsi Bali.

Penelitia Wirawan (2015) yang mengenai Analisis pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita, dan Tingkat pengagguran terhadap jumlah penduduk Miskin Provinsi Bali menunujukan bahwa pendidikan, PDRB Per kapita, dan tingkat pengangguran secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pendidikan dan PDRB Per kapita secacar parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap penduduk miskin. Sedangkan tingkat pengangguran beroengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan secara parsial.

Penelitian Wiguna (2013) yang menganalisis tentang pengaruh PDRB, Pendidikan dan pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2005-2010 menunjukan bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.

Menurut Fahmi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukan bahwa variable tingkat pendidikan (RLS) dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Secara parsial

hanya variable kesehatan yang berpengaruh secara signifikan sedangkan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadapKemiskinan di Provinsi Jambi.

Penelitian Nirwan (2013) yang menganalisis tentang pengaruh Variable Pendidikan terhadap Presentase Pendudukan Miskin (Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di pulau Jawa dan 27 Provinsi diluar pulau Jawa pada tahun 2006-2011) menunjukan bahwa variable Pendidkan yang diprosikan dalam Angka Partisipasi Sekolah berpangaruh terhadap presentase penduduk miskin karena bagi penduduk yang ingin mengikui aktifitas formal diperlukan biaya. Bagi warga yang berasal dari kalangan yang kuranh mampu, biaya menjadi salah satu faktor yang menghambat kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Kemiskinan

#### *1. Pengertian Kemiskinan*

Kemiskinan merupakan yang dihadapi seluruh negara, terutama Negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat *multidimensional,*artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memeiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi social politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder berupa miskin akan jaringan social, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan

baik secara lansung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainya, dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Arsyad,2004).

Kemiskinan adalah keterbatasaninidvidu, kelompok, keluarga, dan Negara unutuk memenuhi berbagai macam kebtuhan dasar, tdak terdapatnya kesejahteraan, keadilan, standar hidup layak, kesehatan, dan pendidikan. Terdapat empat jenis kemiskinan (Suryawati,2005) yaitu:

a. Kemiskinan Relatif
b. Kemiskinan Absolut
c. Kemiskinan Kultural
d. Kemiskinan Struktural

***2. Penyebab Kemiskinan***

Menurut Naskun dalan (Suryawati,2005) beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

a. *Policy induces processes,* yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya anti kemiskinan, tetapi realitanya justru meletarikan.
b. *Socio.-economic dualism,* Negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena soal produksi colonial, yaitu petani menjadi marjinal karena

tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

c. *Population growth,* prespektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertamabahan pangan sperti deret hitung.

d. *Ressaurces management anda the environment,* adalah unsure manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

e. *Natural cycle and processes,* kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekeurangan air sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus. *The marginalization of woman,* peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.

f. *Cultural and ethnic factors,* bekerjanya faktor budaya dan ethnic yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nalayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

g. *Explotative intermendiation,* keberadaan penolong yang menjadi penodong, sperti renetenir.

h. *Internal political fragmentation and civil startfe*, suatu kebijakn yang diterapkan pada suatu daerahyang fragmentasi politiknyakuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

i. *Interbational processe*, bekerjanya system international (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak Negara menjadi miskin.

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi(kuncoro) antara lain:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adamnya ketidakamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Pendudk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbeedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkarang setan kemiskinan (*vicious circle of provety).* Adanya ketrebelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka teriam, rendahnya pendapatan akan

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan *"a poor country is a poor because it is poor"* (Negara miskin itu miskin karena dia miskin).

### 2.2.2. Pengeluaran Pemerintah (Belanja Modal)

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah menyediakan sarana dan prasarana berupa barang publik dan pelayanan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja modal merupakan pengeluaran belanja pemerintah untuk pembelian aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari setahun untuk kepentingan publik. Pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja modal yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun masih terjadi pengeluaran pemerintah yang belum menyentuh langsung kepada penduduk miskin. Maka dengan begitu pemerintah harus memperbaiki langkah-langkah untuk menggunakan sumber keuangan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu dapat mengatasi kemiskinan yang menjadi masalah bagi pemerintahan daerah.

#### *1. Pengaruh Variabel Belanja Modal Terhadap Kedalaman Kemiskinan*

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berapa besarnya pengeluaran pemerintah dalam pengalokasian APBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu daerah. APBD dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan karena

APBD merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik yang memadai. Tujuan utama APBD dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan begitu dapat mengurangi kemiskinan (Bastian, 2006).

### 2.2.3. Tingkat Pengangguran

Pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secar aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno,2004). Pengangguran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkan, antara lain:

1. Pengagguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan olehtindakan sesorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginanya.
2. Pengangguran structural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtor, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Menurut Edgar O. Edwards (Arsyad, 2004), untuk mengelompokan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Waktu (banyak diantara mereka yangbekrja ingin bekerja lebih lama, missal jam kerjanya per hari, per minggu, atau per bulan).
2. Intensitas pekerjaan (yangberkaitan denagn kesehatan dan gizi makanan).
3. Produktivitasnya (kurangnya produktifitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya – sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Berdasarkan hal-hal diatas Edwards memberikan bentuk-bentuk pengangguran adalah:

1. Pengangguran terbuka *(open unemployment)* adalah mereka yang tidak amu bekerja karena menharap pekerjaan yang lebih baik maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memeperoleh pekerjaan).
2. Setengah pengangguran *(under unemployment)* adalah mereka yang bekerja lamanya (hari,minggu,musiman) kurang dari yang mereka bisa kerjakan.
3. Tampak bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur termasuk disini adalah:
    a. Pengangguran tak terkentara, misalnya para petani yang bekerja di lading selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.

b. Pengangguran tersembunyi, misalnya orang kaya bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
c. Pensiun lebih awal, sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi yang "muda-muda" untuk menduduki jabatan diatasnya.

4. Tenaga kerja yang lemah (*impaired)* adalah mereka yang mungkin bekrja penuh tetapi intnsitasnya lemah karena kekurangan gizi atau mengidap penyakit.
5. Tenag kerja yang tidak produktif adalah mereka yang mempu bekrja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

***1. Pengaruh variable tingkat pengangguran terhadap kemiskinan***

Arsyad (2004) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagisebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja peruh waktu *(part time)* selalu berada di antara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demekian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka malah menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama halnya juga bjuga banyak individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap

mendapatkan pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka masih tetap miskin.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangu tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran disuatu Negara sangat buruk, kekacauan politik dan social slalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembanguan ekonomi dalam jangka panjang. (Sukirno,2004).

### 2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliknya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilakan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

### *1. Pengaruh Variabel PDRB Terhadap Kemsikinan*

Menurut Sukirno (2004), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur melalui berdasarkan produk domestic regional bruto(PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmatihasilnya. Karena hal tersebut, maka penurunan PDRB suatu daerah akan berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaks merubah polakonsumsi makan pokonya ke barang yang lebih murah dengan jumlah barang yang berkurang.

## 2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat disusun hipotesa yang akan diajukan dalam penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ho = Diduga Belanja Modal dapat berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Ho = Diduga Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Ho = Diduga PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* berupa 35 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah dan *time series* dengan peiode 2010-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. diperoleh dari (Badan Pusat Statistik), sumber lain yang menjunjung penelitian didapat dari berbagai literature dan jurnal dari berbagai perpustakaan dan *website* resmi universitas. Adapun data yang diambil adalah tingkat kedalaman kemiskinan, Belanja Modal, tingkat pengangguran, dan produk domestic regional bruto (PDRB) per kapita. Alat analisis yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yaitu eviews 8 dan microsof excel 2007.

Periode data yang digunakan adalah data tahun 2010-2018 untuk masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Data yang diperlukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota 2010-2018.
2. Data Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota 2010-2018.
3. Data tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota 2010-2018.

4. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota 2010-2018.

## 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah serta lembaga atau instansi yang terkait dengan masalah tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat pengangguran, belanja modal dan produk domestic regional bruto (PDRB) per kapita.

## 3.3. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variable yang digunakan atau dijadikan sebagai obyek pembahasan adalah keparahan kemiskinan, tingkat pengangguran, belanja modal dan produk domestic regional bruto (PDRB) per kapita. Dari variable tersebut dijelaskan definisinya, sebagai berikut:

### 3.3.1. Kedalaman Kemiskinan (Y)

Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

### 3.3.2. Belanja Modal (X1)

Belanja modal merupakan pengeluaran belanja pemerintah untuk pembelian aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari setahun untuk

kepentingan publik. Dalam penelitian ini, angka Belanja modal akan diubah kedalam bentuk Logaritma, sehingga satuannya adalah (%).

### 3.3.3. Tingkat Pengangguran (X2)

Pengangguran adalah seseorang atau penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan (Stastistik, 2012). Pengertian pengangguran menurut BPS adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk, yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk, yang mungkin merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2018.

### 3.3.4. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (X3)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliknya dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam penelitian ini, angka PDRB per kapita akan diubah kedalam bentuk logaritma (%).

## 3.4. Model Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data panel. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi

antara *time-series data* dan *cross-section data*. Data yang digunakan adalah data time-series selama 9 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2018 dan data cross-section sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu menggunakan uji signifikansi *fixed effect* juga *random effect*. Sedangkan pengujian hipotesa menggunakan analisis koefisien regresi secara individu (uji t), uji koefisien secara simultan (uji F), dan uji koefisien determinansi (R-square).

### 3.4.1. Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan alat software *Eviews 9*. Menurut (Hakim, 2014) keuntungan dalam menggunakan data panel yaitu:

1. Jumlah observasi data yang besar.
2. Meningkatnya derajat bebas.
3. Berkurangnya Kolinearitas antar variabel-variabel penjelas.
4. Meningkatnya efisiensi dari penaksiran ekonometris.
5. Estimasi parameter yang lebih realible dan lebih stabil.

Analisis data panel adalah gabungan antara data cross section dengan time series. Data time series merupakan data yang berdasarkan kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross section merupakan data yang diambil pada waktu yang sama dari beberapa daerah. Dalam penggunaan regresi data panel hanya menggunakan satu persamaan regresi saja. Regresi data panel akan memeberikan hasil yang lebih baik secara statistic kerena penggabungan data cross section dan time series akan

menghasilkan derajat kebebasan yang lebih besar sehingga bisa mengatasi masalah penghilangan variabel (omitted variabel) (Sriyana, (2014).

Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan dalam model sebagai berikut:

$$KMIS_{it} = \beta_o + \beta_1 LOG(BM)_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 LOG(PDRB)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

KKM = Kedalaman Kemiskinan

BM = Belanja Modal

TPT = Tingkat Penganguran Terbuka

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

i = 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

t = Periode Waktu (2010 - 2018)

$\beta_o$ = Konstanta

$\beta_1$-$\beta_3$ = Koefisien

Sriyana (2014) Analisis regresi data panel mimiliki prinsip yaitu menggabungkan data time series dan cross section. Model data panel dapat di estimasi dengan menggunakan metode Ordinari Least Square (OLS). Metode ini

memberikan jumlah data yang banyak sehingga bisa memenuhi persyaratan dan sifat-sifat statistic dengan pilihan beberapa estimasi.

Dalam analisis model data panel sering dikenal tigamacam pendekatan yang terdiri dari pendekatan common effect, pendekatan efek tetap (Fixed effect), dan pendekatan efek acak (Random effect model). Ketiga pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Common Effect Model**

Metode common effect merupakan teknik sederhana untuk mengestimasi data panel, yaitu dengan cara menggabungkan data time series dan cross section tanpa melihat perbedaan waktu dan individu. Metode ini hanya menggunakan pendekatan kebenaran jika data yang digunakan meliputi beberapa unit dan memiliki periode waktu yang sedikit. (Sriyana,2014) Metode common effect menganggap bahwa intersep dan slope tetap baik antar waktu maupun antar individu. Adanya perbedaan intersep dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan. Dengan model persamaan common effect sebagai berikut:

$$KMIS_{it} = \beta 0 + \beta 1 \log(BM)_{it} + \beta 2 TPT_{it} + \beta 3 \log(PDRB)_{it} + \varepsilon_{it}$$

**b. Fixed Effect Model (FEM)**

Sriyana (2014) Model Fixed Effect merupakan model regresi yang menunjukkan perbedaan obyek dengan konstanta antar obyek. Dalam model ini ada asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit

artinya intersep suatu regresi sangat mungkin bisa berubah untuk setiap individu dan waktu. Metode ini dapat dilakukan dengan variabel semu (dummy) yang akan menjelaskan adanya perbedaan antar intersep dan model ini dapat di estimasi dengan menggunakan teknik least square dummy variabel (LADV).

$$KMISit = \beta0 + \beta1\log(BM)it + \beta2TPTit + \beta3\log(PDRB)it + \varepsilon it$$

Untuk membedakan perilaku antara objek (Kabupaten/Kota) maka kita perlu variabel dummy. Berapa variabel dummy yang kita butuhkan adalah k-1 dimana k=jumlah Kabupaten/Kota. Ingat kembali pembahasan variabel dummy sebelumnya. Karena kita mempunyai 35 Kabupaten/Kota maka kita memerlukan 34 variabel dummy. Model *Fixed effect* dengan teknik variabel dummy sbb:

$$KMISit = \beta0 + \beta1\log(BM)it + \beta2TPTit + \beta3\log(PDRB)it + \beta_4 D_{1it} + \ldots.. + \beta_{nit} D_{nit} + \varepsilon it$$

Dimana,

$D_{1it}$ = 1 untuk Kabupaten/Kota A dan 0 untuk Kabupaten/ Kota lainnya

$D_{nit}$ = 1 untuk Kabupaten/Kota dan 0 untuk Kabupaten/Kota lainnya.

**c. Random Effect Model**

Widarjono, A (2013) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel dummy ke dalam model fixed effect memiliki tujuan untuk mewakili kita

tentang model yang sebenarnya. Namun berakibat pada berkurangnya derajat kebebasan yang menyebabkan efisiensi parameter tersebut menjadi berkurang. Masalah ini dapat diatasi dengan cara menggunakan variabel gangguan (error term) yang dikenal dengan metode random effect. Kelebihan dari model random effect yaitu dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan tanpa mengurangi jumlahnya seperti yang digunakan pada model fixed effect, yang berarti hasil estimasi parameter akan semakin efisien. Persamaan untuk model random effect yaitu sebagai berikut:

$\beta 0i = \beta 0 + \mu i$

Dimana,

$\beta 0$ = rata-rata intersep

$\mu i$ = error sifatnya acak

Maka model persamaannya adalah sebagai berikut:

$KMISit = \beta 0 + \beta 1 \log(BM)it + \beta 2 TPTit + \beta 3 \log(PDRB)it + \sum_{i=1}^{35} + \beta_i D_i + V_{it}$

Dimana $Vit = eit + \mu i$

Keterangan:

KMIS = tingkat kedalaman kemiskinan

Log(BM) = Belanja Modal

TPT = Tingkat pengangguran terbuka

Log(PDRB) = PDRB per kapita

i = 35 Kabupaten/Kota

t = kurun waktu 2010-2018

e = error terms

Vit = variabel gangguan

eit = variabel gangguan secara keseluruhan

μi = variabel gangguan yang sifatnya acak

### 3.4.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Sriyana (2014) ada dua cara pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis diantaranya yaitu : pertama, Uji dengan cara membandingkan antara metode common effect dan fixed effect yang disebut dengan Chow test. Kedua, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect dengan random effect.

#### a. Uji F (Chow Test)

Dalam uji ini, uji signifikan fixed effect digunakan dalam memutuskan model manakah yang akan digunakan. Chow test adalah pengujian untuk menentukan model Fixed Effect atau Commom Effect dengan asumsi

Ho : Memilih model Common Effect

Ha : Memilih model Fixed Effect

Apabila hasil yang diterima yaitu menerima Ho maka model yang layak digunkaan untuk estimasi akhir adalah Common effect models, dan model tidak perlu dilanjutkan sampai Random effect models. Sedangkan hasil menunjukkan menolak Ho maka model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu Fixed effect models dan dapat dilanjutkan ke Random effect models.

**b. Uji Hausman**

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model Fixed effect atau model Random effect. Berikut ini adalah hipotesis dalam pengujian uji Hausman:

Ho : Memilih model Random Effect Model

Ha : Memilih model Fixed Effect Model

Jika nilai statistik hausman probabilitas > alpha (0,05) yang digunakan maka model random effect baik untuk digunakan dan jika nilai statistik hausman probabilitas < alpha (0,05), maka model yang digunakan adalah Fixed Effect.

## 3.5. Pengujian Statistik

### 3.5.1. Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur besarnya variasi variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh variabel independen (X). Saat nilai koefisien determinasi (R2) memiliki nilai mendekati 0 maka semakin buruk garis regresinya. Artinya variabel dependen (Y) tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Namun jika nilai koefisien determinasi (R2) semakin besar atau memiliki nilai mendekati 1 maka garis regresinya semakin baik. Artinya variabel independen (X) tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Y).

### 3.5.2. Uji F (Kelayakan Model)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersamasama terhadap variabel dependen dengan nilai signifikasi sebesar 0,05 atau 0,1 (α = 5% atau 10%). Hipotesis Uji F dapat dituliskan sebagai berikut:

H0: β1 = β2 = …. Bn = 0

Ha: β1 ≠ β2 ≠…. Bn = 0

Keputusan untuk menententukan apakah menolak atau gagal menolak H0 dengan membandingkan nilai F hitung dengan F kritis pada tabel distribusi F. Rumus Uji F hitung adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{F} = \frac{R^2 / (K-1)}{1 - R^2 / (n-K)}$$

Dimana:

R 2 = koefisien determinasi

k = jumlah parameter estimasi termasuk intersep

n = jumlah observasi

Dengan begitu jika nilai F hitung > F kritis maka menolak H0. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai F hitung < F kritis maka gagal menolak H0. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, untuk menentukan menolak H0 atau gagal menolak H0 juga dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dibandingkan dengan α. Jadi jika nilai probabilitas > α maka gagal menolak H0. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitas < α maka menolak H0.

### 3.5.3. Uji T

Uji t-statistik dilakukan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas secara individu memberikan pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan derajat signifikansi 1%, 5%, dan 10% serta pengujian hipotesis dua sisi *(2-tailed)*, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

**Hipotesis 1**

Ho : $\beta_1 = 0$ artinya Belnaja Modal tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kedalaman Kemiskinan.

$H_1$ : $\beta_1 \neq 0$ artinya Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kedalaman Kemiskinan.

**Hipotesis 2**

Ho : $\beta_2 = 0$ artinya Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kedalaman Kemiskinan.

$H_1$ : $\beta_2 \neq 0$ artinya Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kedalaman Kemiskinan.

**Hipotesis 3**

Ho : $\beta_3 = 0$ artinya PDRB per kapita tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kedalaman Kemiskinan.

$H_1$ : $\beta_3 \neq 0$ artinya variabel Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB per kapita.

Kriteria uji t-statistik yaitu $H_1$ diterima dan $H_0$ ditolak jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel $\alpha$ = 1%, 5%, 10% dan sebaliknya. Bisa juga dilihat dari nilai *probabilitas,* apabila nilai *probabilitas* < tingkat signifikansi 1%, 5 %, dan 10%, maka $H_1$ diterima dan $H_0$ ditolak, begitupun sebaliknya.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Deskripsi data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedalaman kemiskinan dalam satuan Ribu jiwa, variable independen berupa data sekunder yaitu belanja modal dalam satuan milyar indeks pembangunan manusia dalam satuan persen tingkat pengangguran terbuka dalam satuan persen dan produk domestic regional bruto dalam satuan juta rupiah. Penelitian ini dilakukan di 35 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018, dalam menganalisis data penelitian menggunakan *E-views 9* dengan menggunakan model regres data panel. Analisis hasil regres ini menjelaskan model regres dan uji sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk model yang terbaik sehingga mampu menjelaskan permasalahan yang hendak di jawab dan sesuai tujuan penelitian.

**Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif**

| Variabel | Mean | Std. Dev. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| KMIS | 2.098 | 0.912055 | 0.47 | 4.74 |
| BM | 259283.6 | 175787.1 | 27888 | 1611808 |
| TPT | 5.614825 | 2.032285 | 1.5 | 14.22 |
| PDRB | 22063290 | 20950643 | 4010718 | 131000000 |

## 4.2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Model regresi data panel memiliki 3 (tiga) model yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Setelah dilakukan pengolahan data panel menggunakan Eviews 9 maka diperoleh hasil estimasinya yaitu sebagai berikut:

### 4.2.1. Hasil Estimasi Model *Common Effect*

Hasil regresi data panel dengan menggunakan model *Common Effect* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Hasil Estimasi Model Comment Effect**

Dependent Variable: KMIS
Method: Panel Least Squares
Date: 11/08/21 Time: 15:46
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 315

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 6.013575 | 1.376868 | 4.367574 | 0.0000 |
| LOG(BM) | -0.152595 | 0.097655 | -1.562582 | 0.1192 |
| TPT | -0.047128 | 0.025919 | -1.818271 | 0.0700 |
| LOG(PDRB) | -0.106742 | 0.093676 | -1.139478 | 0.2554 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.030956 | Mean dependent var | 2.098000 |
| Adjusted R-squared | 0.021608 | S.D. dependent var | 0.912055 |
| S.E. of regression | 0.902147 | Akaike info criterion | 2.644538 |
| Sum squared resid | 253.1133 | Schwarz criterion | 2.692190 |
| Log likelihood | -412.5148 | Hannan-Quinn criter. | 2.663577 |
| F-statistic | 3.311584 | Durbin-Watson stat | 0.241255 |
| Prob(F-statistic) | 0.020391 | | |

*Sumber: Data Sekunder Diolah Eviews 9, 2021*

### 4.2.2. Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

**Tabel 4. 3 Hasil Estimasi Model Fixed Effect**

Dependent Variable: KMIS
Method: Panel Least Squares
Date: 08/28/21 Time: 10:33
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 315

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 20.20535 | 3.605133 | 5.604607 | 0.0000 |
| LOG(BM) | -0.101616 | 0.060505 | -1.679454 | 0.0942 |
| TPT | -0.011840 | 0.014212 | -0.833085 | 0.4055 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LOG(PDRB) | -1.008276 | 0.248708 | -4.054047 | 0.0001 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.889959 | Mean dependent var | 2.098000 |
| Adjusted R-squared | 0.875261 | S.D. dependent var | 0.912055 |
| S.E. of regression | 0.322124 | Akaike info criterion | 0.684952 |
| Sum squared resid | 28.74253 | Schwarz criterion | 1.137644 |
| Log likelihood | -69.87998 | Hannan-Quinn criter. | 0.865820 |
| F-statistic | 60.54724 | Durbin-Watson stat | 1.982548 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

*Sumber: Data Sekunder Diolah Eviews 9, 2021*

### 4.2.3. Hasil Estimasi Model *Randoom Effect*

**Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Model Randoom Effect**

Dependent Variable: KMIS
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 11/08/21 Time: 15:49
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 315
Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 13.17916 | 2.538538 | 5.191635 | 0.0000 |
| LOG(BM) | -0.189718 | 0.050832 | -3.732222 | 0.0002 |
| TPT | -0.004805 | 0.013735 | -0.349800 | 0.7267 |
| LOG(PDRB) | -0.523868 | 0.174785 | -2.997212 | 0.0029 |

Effects Specification

| | S.D. | Rho |
|---|---|---|
| Cross-section random | 0.844404 | 0.8730 |
| Idiosyncratic random | 0.322124 | 0.1270 |

Weighted Statistics

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.218989 | Mean dependent var | 0.264651 |
| Adjusted R-squared | 0.211455 | S.D. dependent var | 0.367733 |
| S.E. of regression | 0.326547 | Sum squared resid | 33.16293 |
| F-statistic | 29.06727 | Durbin-Watson stat | 1.749874 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

## 4.3. Pemilihan Model Regresi

Pada model regresi data panel terdapat 3 model yang digunakan, diantaranya adalah *common effect model, fixed effect model* dan *random effect model.* Sebelum memilih model mana yang tepat digunankan untuk penelitian ini, maka harus dilakukan pengujian terhadap data yang diperoleh dengan uji chow dan uji hausman.

### 4.3.1. Uji Signifikansi *Fixed Effect* (Uji Chow)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui model manakah yang tepat digunakan dalam penelitian, *common effect model* atau *fixed effect model.* Uji chow berdasarkan *p-value* apabila signifikan < 5% maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sedangkan apabila *p-value* tidak signifikan > 5% maka model yang digunakan adalah model *Common Effect*.dengan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0$: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, maka gagal menolak $H_0$, artinya model yang layak digunakan adalah *Common Effect Model.*
- $H_1$: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, maka menolak $H_1$, artinya model yang layak digunakan adalah *Fixed Effect Model.*

**Tabel 4. 5 Uji chow dengan Redundant Test**

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section F | 63.597786 | (34,277) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 685.269592 | 34 | 0.0000 |

*Sumber : Hasil pengelolaan dengan eviews 9, 2021*

Dari **Tabel 4.5** diperoleh nilai probabilitas *Cross-section Chi-Square* sebesar 0,0000 yang mana lebih kecil dari alfa (0,05). Maka secara statistik signifikan menolak $H_0$, yang artinya model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model.*

### 4.3.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih Model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect.* Uji hausman berdasarkan *p-value* apabila signifikan < 5% maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sedangkan apabila *p-value* tidak signifikan > 5% maka model yang digunakan adalah model *Random Effect* Hipotesisnya adalah sebagai berikut

- $H_0$: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$, maka gagal menolak $H_0$, artinya model yang layak digunakan adalah *Random Effect Model.*
- $H_1$: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$, maka menolak $H_1$, artinya model yang layak digunakan adalah *Fixed Effect Model.*

**Tabel 4. 6 Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RE
Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section random | 11.600655 | 3 | 0.0089 |

*Sumber : Hasil pengolahan data dengan eviews 9, 2021*

Nilai probabilitas *cross-section random* dari perhitungan menggunakan *Eviews 9* adalah sebesar 0,0089 yang mana lebih kecil dari $\alpha = 1\%$ . Maka secara statistik signifikan menolak $H_0$, yang artinya model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model.*

### 4.4. Pengujian Statistik

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model terbaik, maka didapatkan hasil bahwa model regresi panel terbaik dalam penelitian ini yaitu model *Fixed Effect.* Teknik ini adalah pengestimasian menggunakan *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar variabel namun dengan intersep waktu yang sama. Selain itu, model ini juga dapat mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar variabel dan antar waktu. Oleh karena itu, hasil estimasi model *Fixed Effect* akan diinterpretasikan secara statistic yang terdiri dari Uji Koefisien Determinasi ($R^2$), Uji Serempak (Uji F-statistik) dan Uji Parsial (Uji T-statistik).

**Tabel 4. 7 Hasil Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Model Fixed Effect**

Dependent Variable: KMIS
Method: Panel Least Squares

Date: 08/28/21 Time: 10:33
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 315

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 20.20535 | 3.605133 | 5.604607 | 0.0000 |
| LOG(BM) | -0.101616 | 0.060505 | -1.679454 | 0.0942 |
| TPT | -0.011840 | 0.014212 | -0.833085 | 0.4055 |
| LOG(PDRB) | -1.008276 | 0.248708 | -4.054047 | 0.0001 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.889959 | Mean dependent var | 2.098000 |
| Adjusted R-squared | 0.875261 | S.D. dependent var | 0.912055 |
| S.E. of regression | 0.322124 | Akaike info criterion | 0.684952 |
| Sum squared resid | 28.74253 | Schwarz criterion | 1.137644 |
| Log likelihood | -69.87998 | Hannan-Quinn criter. | 0.865820 |
| F-statistic | 60.54724 | Durbin-Watson stat | 1.982548 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

*Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9, 2021*

### 4.4.1. Koefisien determinasi ($R^2$)

Berdasarkan **Tabel 4.7,** maka diperoleh informasi bahwa nilai R-Squared yaitu sebesar 0.8899 yang memiliki arti bahwa variabel Belanja Modal, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB per kapita dapat menjelaskan Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010-2018 sebesar 89%, sementara sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

### 4.4.2. Uji Serempak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Berdasarkan **Tabel 4.7,** maka diperoleh informasi bahwa nilai F-statistik yaitu sebesar 60.54724 dan nilai Probabilitas F-statistik yaitu sebesar 0.00000 < α = 1%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel Belanja Modal, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB per kapita dapat berpengarubh terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2010-2018.

### 4.4.3. Uji Parsial (Uji T-Statistik)

Uji statistic t bertujuan untuk menunjukan seberapa besar pengaruh antara variable bebas (independen) secara individu dalam menerangkan variable terikat (dependen) dengan membandingkan probabilitas t dengan nilai α sebesar 1%, 5%, dan 10%. Apabilai nilai Probabilitas T-statistik < α = 1%, 5%, dan 10%, maka menolak Ho dan apabila nilai probabilitas T-statistik > α = 1%, 5%, Dan 10% maka gagal menolak Ho. Dengan demikian, dapat dilihat apakah Ho ditolak atau gagal ditolak berdasarkan hasil uji t. Hasil Uji T-statistik adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial (Uji T-statistik)**

| Variabel | Koefisien | Probabilitas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Constanta | 20.20535 | 0.0000 | Menolak Ho pada α 10% |
| Log(Belanja Modal) | -0.101616 | 0.0942/2=0.0472 | Menolak Ho pada α 10% |
| TPT | -0.011840 | 0.4055 | Gagal Menolak Ho |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Log (PDRB) | -1.008276 | 0.0001 | Menolak Ho pada α 10% |

*Sumber: olah data eviews 9, 2021*

Hasil uji t yang ditunjukan pada **Table 4.8** model fixed effect diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. **Pengaruh Constanta Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah**

   Berdasarkan **Tabel 4.8,** maka didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 < α 10%, sehingga menolak Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwan variabel Constanta dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa Tengah.

   Nilai Koefisien sebesar 20.20535 memiliki arti bahawa apabila Belanja Modal, Tingkat Pengangguran dan PDRB per kapita diasumsikan 0, maka Kedalaman Kemiskinan akan meningkat sebesar 20.21%.

2. **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah**

   Berdasarkan **Tabel 4.8,** maka didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0942/2=0.0471 < α 10%, sehingga menolak Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa Tengah.

   Nilai Koefisien sebesar -0.101616 memiliki arti bahawa apabila Belanja Modal naik sebesar 1%, maka Kedalaman Kemiskinan akan menurun sebesar 0.1%.

3. **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah**

   Berdasarkan **Tabel 4.8,** maka didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.4055 > α 10%, sehingga gagal menolak Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwan variabel Tingkat pengangguran terbuka tidak dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa Tengah.

   Nilai Koefisien sebesar -0.011840 memiliki arti bahawa apabila Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 1%, maka Kedalaman Kemiskinan akan meningkat sebesar 0,01%.

4. **Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah**

   Berdasarkan **Tabel 4.8,** maka didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0001 < α 10%, sehingga menolak Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwan variabel PDRB Perkapita dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa Tengah.

   Nilai Koefisien sebesar -1.008276 memiliki arti bahawa apabila PDRB per kapita naik sebesar 1%, maka Kedalaman Kemiskinan akan menurun sebesar 1.01%.

## 4.5. Analisis Ekonomi

### 4.5.1. Persamaan Estimasi dengan Intersep

Persamaan estimasi *cross effect* dihasilkan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil estimasi dengan hasil estimasi koefisien *cross effect. Cross effect* diperoleh berdasarkan estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam penelitian, maka sesungguhnya koefisien tersebut akan dimiliki oleh masing-masing unit atau individu (Sriyana, 2014)

### 4.5.2. Pengaruh Constanta Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan **Tabel 4.8,** maka didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 < α 10%, sehingga menolak Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwan variabel Constanta dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai Koefisien sebesar 20.20535 memiliki arti bahawa apabila Belanja Modal, Tingkat Pengangguran dan PDRB per kapita diasumsikan 0, maka Kedalaman Kemiskinan akan meningkat sebesar 20.21%.

### 4.5.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan **Tabel 4.8,** maka didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0942 < α 10%, sehingga menolak Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai Koefisien sebesar -0.101616 memiliki arti bahawa apabila Belanja Modal naik sebesar 1%, maka Kedalaman Kemiskinan akan menurun sebesar 0.1%. Jadi dapat disimpulkan karena APBD merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik yang memadai. Tujuan utama APBD dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat dengan begitu dapat mengurangi kemiskinan (Bastian, 2006).

### 4.5.4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan **Tabel 4.8,** maka didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.4055 > α 10%, sehingga gagal menolak Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwan variabel Tingkat pengangguran terbuka tidak dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa Tengah. Nilai Koefisien sebesar -0.011840 memiliki arti bahawa apabila Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 1%, maka Kedalaman Kemiskinan akan meningkat sebesar 0,01%. Jadi dapat disimulkan analisis ini sesua dngan jurnal bahwa Pengaruh tingkat pengangguran (X) tingkat kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat negatif dan signifikan disebabkan oleh sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian melibatkan hampir seluruh anggota keluarga (tingkat pengangguran yang rendah) tetapi dengan penghasilan yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga walaupun dengan tingkat pengangguran yang rendah (karena sebagian besar bekerja), namun mereka tetap miskin.(Yarlina yacoub 2012)

### 4.5.5. Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan **Tabel 4.8,** maka didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0001 < α 10%, sehingga menolak Ho. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwan variabel PDRB Perkapita dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai Koefisien sebesar -1.008276 memiliki arti bahawa apabila PDRB per kapita naik sebesar 1%, maka Kedalaman Kemiskinan akan menurun sebesar 1.01%. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai bersih barang dan jasajasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hadi Sasana, 2006).

# BAB V

# KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari data dan pembahsan diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kedalamn kemiskinan di Proinsi Jawa tengah pada tahun 2010-2018. Hal tersebut dapat dilihat pada data tabel di atas semakin tinggi belanja modal pada suatu daerah tertentu dapat menurunkn jumlah penduduk miskin.
2. Tingkat pengangguran terbuka tidak dapat berpengaruh terhadap Kedalaman Kemiskinann di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2010-2018. hal tersebut disebabkan ketika sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian melibatkan hampir seluruh anggota keluarga (tingkat pengangguran yang rendah) tetapi dengan penghasilan yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
3. PDRB per kapita dapat berpengaruh negative dan signifikan terhadap kedalam kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2018. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

## 5.2. Implikasi

Implikasi yang dapat disampaikan atas temuan empiris dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh Negatif terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tenga. Maka daripada itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang mengagur dengan menyiapkan lapangan pekerjaan. Karena pengangguran memiliki pengaruh yang sanga besar terhadap kemiskinan.
2. PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tenga. Maka peran pemerintah diperlukan untuk memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi melalui PDRB dan memperbaiki kebijakan mengenai pengalokasian pendapatan derah yang masih tidak merata agar tidak terjadi kesenjangan, sehingga dapat berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tenga. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah untuk sektor publik tidak begitu berpengaruh langsung dalam menurunkan kemiskinan. Adapun cara pemerintah untuk memfokuskan pengeluaran pemerintah untuk peningakatan pembangunan manusia seperti pengeluaran publik dibidang kesehatan dan pendidikan maka pengaruhnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka pemerintah diharapkan dapat fokus dalam pengambilan kebijakan dalam menggunakan sumber keuangan untuk pengeluaran pemerintah secara optimal dalam meningkatkan pelayanan

pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


Bank Dunia. (2016). *Statistic Education*. Retrieved from The World Bank: https://data.worldbank.org/topic/education

Rahmawati, S. (2016). *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, dan Kesehatan Perspektif di Indonesia* . Yogyakarta: Deepublish.

Todaro, M., & Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan.* Jakarta: Erlangga.

Wirawan, I. T. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. *Ekonomi Pembangunan*, 551.

Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indinesia (KTI) Periode 2001-2010. Econosains.

Arsyad, L. (2004). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE Yogyakarta.

Astrini, N. M. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Ilmu Ekonomi.

Bank Dunia. (2016). Statistic Education. Retrieved from The World Bank: https://data.worldbank.org/topic/education

Fahmi , A. (2015). Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Development.

Kuncoro, M. (2010). Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nirwana, I. D. (2013). Pengaruh Variabel Pendidikan terhadapa Presentase Penduduk Miskin (Studi pada 33 Provinsi di Indonesia, 6 Provinsi di Pulau

Jawa dan 27 Provinsi di luar Pulau Jawa pada Tahun 2006 - 2011). Ilmu Ekonomi.

Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahmawati, S. (2016). Ekonomi Sumber Daya Manusia, Kemiskinan, dan Kesehatan Perspektif di Indonesia . Yogyakarta: Deepublish.

Sriyana, J. (2014). Metode Regresi Data Panel. Yogyakarta: Ekonisia.

Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Grafindo Persada.

Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. JMPK Vol. 08.

Susantui, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di JAwa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. Jurnal Matematika Integratif.

Tarigan, R. (2005). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Todaro, M., & Smith, S. (2006). Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Wiguna, V. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah.

Wirawan, I. T. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali. Ekonomi Pembangunan, 551.

Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemisiknan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Ilmu Ekonomi, 183.

## LAMPIRAN

**Lampiran I**

**Data Obsevasi Kedalaman kemiskinan, Melanja Modal, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan PDRB Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018 di 35 propinsi**

| KABUPATEN DAN KOTA | TAHUN | KED. KEMISKINAN | Belanja Modal (X1) | TPT | PDRB |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN CILACAP | 2010 | 3,04 | 125.967 | 9,75 | 75.099.089,89 |
| KABUPATEN CILACAP | 2011 | 2,59 | 199.536 | 10,82 | 78.156.818,82 |
| KABUPATEN CILACAP | 2012 | 2,22 | 336.135 | 7,29 | 79.702.237,61 |
| KABUPATEN CILACAP | 2013 | 2,06 | 324.565 | 6,68 | 81.022.670,26 |
| KABUPATEN CILACAP | 2014 | 2,37 | 373.903 | 5,65 | 83.391.500,18 |
| KABUPATEN CILACAP | 2015 | 2,71 | 346.453 | 8,01 | 88.357.606,68 |
| KABUPATEN CILACAP | 2016 | 2,58 | 601.362 | 0 | 92.858.649,84 |
| KABUPATEN CILACAP | 2017 | 1,98 | 656.767 | 6,3 | 95.264.186,69 |
| KABUPATEN CILACAP | 2018 | 1,87 | 567.351 | 7,48 | 98.172.612,56 |
| KABUPATEN BANYUMAS | 2010 | 3,56 | 77.957 | 7,37 | 23.016.943,39 |
| KABUPATEN BANYUMAS | 2011 | 3,69 | 254.640 | 6,61 | 24.538.595,63 |
| KABUPATEN BANYUMAS | 2012 | 3,42 | 267.278 | 5,11 | 25.982.158,22 |
| KABUPATEN BANYUMAS | 2013 | 3,24 | 409.457 | 5,45 | 27.793.138,47 |
| KABUPATEN BANYUMAS | 2014 | 2,48 | 364.731 | 5,37 | 29.367.687,40 |
| KABUPATEN BANYUMAS | 2015 | 2,91 | 380.987 | 6,37 | 31.164.876,40 |
| KABUPATEN BANYUMAS | 2016 | 3,08 | 413.017 | 0 | 33.051.046,65 |
| KABUPATEN BANYUMAS | 2017 | 3,19 | 427.419 | 4,62 | 35.147.313,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN BANYUMAS | 2018 | 2,6 | 536.185 | 4,19 | 37.414.500,58 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2010 | 4 | 68.333 | 3,82 | 10.858.631,52 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2011 | 3,11 | 82.051 | 5,1 | 11.474.221,22 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2012 | 3,72 | 126.405 | 5,02 | 12.138.445,34 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2013 | 3,2 | 125.910 | 5,63 | 12.778.311,23 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2014 | 3,26 | 129.737 | 5,13 | 13.397.712,78 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2015 | 3,37 | 148.476 | 4,84 | 14.130.612,26 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2016 | 3,85 | 297.773 | 0 | 14.816.429,63 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2017 | 2,79 | 449.495 | 5,33 | 15.612.285,90 |
| KABUPATEN PURBALINGGA | 2018 | 2,79 | 317.084 | 6,06 | 16.458.708,49 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2010 | 3,34 | 57.756 | 3,1 | 9.439.359,00 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2011 | 3,15 | 151.463 | 4,97 | 9.952.403,66 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2012 | 3,39 | 172.880 | 3,69 | 10.473.363,43 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2013 | 2,91 | 163.097 | 4,16 | 11.043.083,01 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2014 | 2,88 | 235.343 | 4,06 | 11.629.845,85 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2015 | 3,51 | 278.333 | 5,05 | 12.266.046,35 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2016 | 3,03 | 388.304 | 0 | 12.932.884,85 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2017 | 3,25 | 405.078 | 4,72 | 13.663.266,65 |
| KABUPATEN BANJARNEGARA | 2018 | 2,08 | 432.189 | 4 | 14.438.149,74 |
| KABUPATEN KEBUMEN | 2010 | 3,68 | 72.454 | 8,02 | 12.311.421,83 |
| KABUPATEN KEBUMEN | 2011 | 3,94 | 145.574 | 4,73 | 13.068.985,50 |
| KABUPATEN KEBUMEN | 2012 | 3,35 | 220.424 | 3,58 | 13.707.057,24 |
| KABUPATEN KEBUMEN | 2013 | 3,57 | 254.695 | 3,52 | 14.333.333,50 |
| KABUPATEN KEBUMEN | 2014 | 2,78 | 369.222 | 3,25 | 15.163.091,84 |
| KABUPATEN KEBUMEN | 2015 | 4,08 | 276.330 | 4,14 | 16.115.554,01 |
| KABUPATEN KEBUMEN | 2016 | 3,78 | 505.174 | 0 | 16.923.719,54 |
| KABUPATEN KEBUMEN | 2017 | 3,62 | 476.391 | 5,58 | 17.792.465,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN KEBUMEN | 2018 | 2,48 | 442.056 | 5,52 | 18.773.833,50 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2010 | 2,67 | 72.950 | 3,4 | 8.513.490,56 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2011 | 2,82 | 105.265 | 5,3 | 8.993.814,30 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2012 | 2,78 | 171.088 | 3,2 | 9.406.242,93 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2013 | 1,98 | 164.192 | 5,15 | 9.870.969,95 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2014 | 1,85 | 218.582 | 5,1 | 10.312.937,79 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2015 | 2,43 | 169.301 | 4,01 | 10.862.645,98 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2016 | 2,67 | 268.364 | 0 | 11.421.552,22 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2017 | 2,25 | 365.294 | 3,64 | 12.028.190,37 |
| KABUPATEN PURWOREJO | 2018 | 1,67 | 290.519 | 4,51 | 12.668.117,97 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2010 | 3,96 | 35.736 | 4,04 | 9.005.925,54 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2011 | 4,52 | 139.178 | 4,92 | 9.489.550,46 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2012 | 3,91 | 211.558 | 5,21 | 9.935.905,32 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2013 | 4,26 | 222.816 | 5,82 | 10.333.757,05 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2014 | 3,91 | 318.104 | 5,34 | 10.828.168,68 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2015 | 4,74 | 270.968 | 4,47 | 11.334.080,04 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2016 | 4,02 | 352.673 | 0 | 11.941.198,92 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2017 | 3,85 | 379.792 | 4,35 | 12.405.048,84 |
| KABUPATEN WONOSOBO | 2018 | 3,25 | 361.634 | 3,11 | 13.017.627,75 |
| KABUPATEN MAGELANG | 2010 | 2,05 | 73.497 | 2,97 | 14.363.230,57 |
| KABUPATEN MAGELANG | 2011 | 2,05 | 155.335 | 6,83 | 15.323.039,48 |
| KABUPATEN MAGELANG | 2012 | 2,09 | 261.239 | 4,38 | 16.071.142,55 |
| KABUPATEN MAGELANG | 2013 | 1,72 | 279.926 | 6,13 | 17.020.755,61 |
| KABUPATEN MAGELANG | 2014 | 2,07 | 381.113 | 7,45 | 17.936.288,38 |
| KABUPATEN MAGELANG | 2015 | 1,6 | 272.701 | 5,16 | 18.864.651,97 |
| KABUPATEN MAGELANG | 2016 | 1,84 | 399.573 | 0 | 19.882.244,24 |
| KABUPATEN MAGELANG | 2017 | 1,67 | 453.983 | 2,27 | 20.937.301,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN MAGELANG | 2018 | 1,55 | 619.732 | 2,78 | 22.074.995,90 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2010 | 2,34 | 49.358 | 3,9 | 13.721.701,47 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2011 | 2,15 | 141.318 | 5,81 | 14.592.026,26 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2012 | 2,14 | 182.775 | 4,43 | 15.369.974,36 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2013 | 2,35 | 248.859 | 5,44 | 16.266.498,68 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2014 | 1,62 | 302.476 | 4,95 | 17.148.350,76 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2015 | 2,01 | 280.014 | 2,03 | 18.170.383,95 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2016 | 2,56 | 380.100 | 0 | 19.139.359,22 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2017 | 1,96 | 411.869 | 2,38 | 20.249.399,44 |
| KABUPATEN BOYOLALI | 2018 | 1,26 | 462.095 | 2,28 | 21.407.484,05 |
| KABUPATEN KLATEN | 2010 | 2,95 | 28.723 | 4,5 | 17.002.049,66 |
| KABUPATEN KLATEN | 2011 | 3,43 | 155.759 | 7,63 | 18.071.350,51 |
| KABUPATEN KLATEN | 2012 | 2,14 | 183.942 | 3,7 | 19.102.402,71 |
| KABUPATEN KLATEN | 2013 | 2,37 | 181.803 | 5,34 | 20.241.429,01 |
| KABUPATEN KLATEN | 2014 | 2,02 | 256.706 | 4,75 | 21.424.522,36 |
| KABUPATEN KLATEN | 2015 | 2,72 | 262.172 | 2,51 | 22.558.976,15 |
| KABUPATEN KLATEN | 2016 | 2,7 | 140.830 | 0 | 23.725.740,98 |
| KABUPATEN KLATEN | 2017 | 2,46 | 334.507 | 3,17 | 24.989.902,87 |
| KABUPATEN KLATEN | 2018 | 1,72 | 317.539 | 2,34 | 26.381.363,13 |
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2010 | 1,54 | 44.902 | 7,4 | 16.357.221,65 |
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2011 | 1,68 | 88.588 | 6,27 | 17.319.638,62 |
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2012 | 1,78 | 193.154 | 6,1 | 18.342.247,26 |
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2013 | 0,91 | 202.559 | 5,98 | 19.401.889,44 |
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2014 | 0,76 | 213.614 | 4,6 | 20.449.009,84 |
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2015 | 1,09 | 240.339 | 4,52 | 21.612.078,19 |
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2016 | 1,36 | 249.961 | 0 | 22.847.982,81 |
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2017 | 0,93 | 355.699 | 4,55 | 24.163.939,48 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN SUKOHARJO | 2018 | 0,97 | 375.802 | 4,82 | 25.570.865,09 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2010 | 3,02 | 79.854 | 4,7 | 13.310.571,10 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2011 | 3,09 | 138.830 | 3,82 | 13.786.711,34 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2012 | 1,76 | 204.300 | 3,46 | 14.605.088,22 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2013 | 1,74 | 196.669 | 3,61 | 15.303.280,47 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2014 | 1,65 | 190.343 | 3,45 | 16.107.795,17 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2015 | 2,1 | 253.535 | 3,07 | 16.977.198,56 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2016 | 1,68 | 307.793 | 0 | 17.869.145,42 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2017 | 1,8 | 396.863 | 3,02 | 18.820.497,77 |
| KABUPATEN WONOGIRI | 2018 | 1,71 | 334.991 | 2,24 | 19.839.038,83 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2010 | 1,98 | 53.706 | 6,62 | 16.393.788,72 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2011 | 1,98 | 70.950 | 5,78 | 17.205.063,88 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2012 | 2,24 | 105.905 | 5,82 | 18.219.456,66 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2013 | 2,36 | 126.883 | 3,84 | 19.256.516,28 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2014 | 2,02 | 206.588 | 3,54 | 20.262.444,42 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2015 | 1,82 | 183.435 | 3,6 | 21.286.287,14 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2016 | 2,09 | 237.264 | 0 | 22.436.293,80 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2017 | 1,85 | 207.774 | 2,85 | 23.731.952,05 |
| KABUPATEN KARANGANYAR | 2018 | 1,7 | 232.192 | 3,26 | 25.150.277,73 |
| KABUPATEN SRAGEN | 2010 | 2,85 | 54.779 | 4,09 | 15.832.557,66 |
| KABUPATEN SRAGEN | 2011 | 2,89 | 98.845 | 8,43 | 16.870.231,27 |
| KABUPATEN SRAGEN | 2012 | 2,38 | 166.720 | 5,88 | 17.902.104,86 |
| KABUPATEN SRAGEN | 2013 | 2,38 | 102.838 | 5,63 | 19.102.181,74 |
| KABUPATEN SRAGEN | 2014 | 2,04 | 219.752 | 6,04 | 20.169.824,79 |
| KABUPATEN SRAGEN | 2015 | 2,69 | 174.926 | 4,51 | 21.390.871,20 |
| KABUPATEN SRAGEN | 2016 | 2,92 | 305.828 | 0 | 22.625.821,66 |
| KABUPATEN SRAGEN | 2017 | 1,93 | 320.755 | 3,19 | 23.976.752,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN SRAGEN | 2018 | 2,31 | 408.470 | 2,87 | 25.355.124,94 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2010 | 2,48 | 84.890 | 4,6 | 12.766.021,74 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2011 | 2,62 | 184.927 | 5,33 | 13.172.711,96 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2012 | 2,55 | 259.826 | 4,2 | 13.842.047,14 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2013 | 2,2 | 383.645 | 6,1 | 14.474.728,93 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2014 | 2,33 | 296.953 | 4,25 | 15.064.456,66 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2015 | 2,56 | 272.012 | 5,22 | 15.962.619,43 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2016 | 1,78 | 390.007 | 0 | 16.682.629,70 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2017 | 2,03 | 528.090 | 3,83 | 17.659.254,29 |
| KABUPATEN GROBOGAN | 2018 | 1,67 | 376.266 | 3,61 | 18.702.306,35 |
| KABUPATEN BLORA | 2010 | 2,38 | 55.678 | 5,49 | 10.149.079,63 |
| KABUPATEN BLORA | 2011 | 2,35 | 204.602 | 6,9 | 10.597.723,01 |
| KABUPATEN BLORA | 2012 | 2,19 | 263.638 | 4,75 | 11.116.865,91 |
| KABUPATEN BLORA | 2013 | 2,39 | 277.566 | 6,23 | 11.712.504,85 |
| KABUPATEN BLORA | 2014 | 2,09 | 350.245 | 4,3 | 12.227.201,29 |
| KABUPATEN BLORA | 2015 | 2,08 | 267.985 | 4,68 | 12.882.587,70 |
| KABUPATEN BLORA | 2016 | 2,17 | 349.046 | 0 | 15.914.663,42 |
| KABUPATEN BLORA | 2017 | 1,53 | 377.299 | 3,56 | 16.866.148,73 |
| KABUPATEN BLORA | 2018 | 1,62 | 423.228 | 3,33 | 17.607.942,16 |
| KABUPATEN REMBANG | 2010 | 3,5 | 63.193 | 4,89 | 8.373.546,87 |
| KABUPATEN REMBANG | 2011 | 2,86 | 157.302 | 7,22 | 8.808.302,78 |
| KABUPATEN REMBANG | 2012 | 2,76 | 89.948 | 5,75 | 9.277.163,23 |
| KABUPATEN REMBANG | 2013 | 3,4 | 184.418 | 5,97 | 9.780.750,39 |
| KABUPATEN REMBANG | 2014 | 2,9 | 189.999 | 5,23 | 10.284.274,36 |
| KABUPATEN REMBANG | 2015 | 3,47 | 175.191 | 4,51 | 10.850.269,20 |
| KABUPATEN REMBANG | 2016 | 3,28 | 387.881 | 0 | 11.423.008,30 |
| KABUPATEN REMBANG | 2017 | 3,24 | 279.649 | 4,84 | 12.138.569,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN REMBANG | 2018 | 2,86 | 363.851 | 3,78 | 12.855.231,29 |
| KABUPATEN PATI | 2010 | 2,43 | 113.308 | 6,22 | 18.782.546,64 |
| KABUPATEN PATI | 2011 | 2,07 | 128.347 | 11,17 | 19.893.325,24 |
| KABUPATEN PATI | 2012 | 1,72 | 179.058 | 11,98 | 21.072.328,70 |
| KABUPATEN PATI | 2013 | 1,83 | 253.211 | 7,29 | 22.329.693,98 |
| KABUPATEN PATI | 2014 | 1,54 | 251.217 | 6,37 | 23.365.213,99 |
| KABUPATEN PATI | 2015 | 2,02 | 185.464 | 4,43 | 24.770.325,07 |
| KABUPATEN PATI | 2016 | 1,99 | 316.516 | 0 | 26.130.205,34 |
| KABUPATEN PATI | 2017 | 1,44 | 289.331 | 4,47 | 27.608.968,08 |
| KABUPATEN PATI | 2018 | 1,37 | 297.331 | 7,16 | 29.194.706,71 |
| KABUPATEN KUDUS | 2010 | 0,92 | 160.784 | 6,22 | 52.933.496,31 |
| KABUPATEN KUDUS | 2011 | 1,16 | 162.858 | 8,32 | 55.175.794,89 |
| KABUPATEN KUDUS | 2012 | 0,92 | 197.249 | 5,89 | 57.440.810,51 |
| KABUPATEN KUDUS | 2013 | 0,78 | 149.340 | 8,07 | 59.944.556,52 |
| KABUPATEN KUDUS | 2014 | 0,9 | 280.675 | 5,03 | 62.600.680,87 |
| KABUPATEN KUDUS | 2015 | 0,9 | 375.070 | 5,04 | 65.029.937,50 |
| KABUPATEN KUDUS | 2016 | 1,07 | 408.572 | 0 | 66.679.583,36 |
| KABUPATEN KUDUS | 2017 | 1 | 418.338 | 1,78 | 68.817.634,53 |
| KABUPATEN KUDUS | 2018 | 0,88 | 343.948 | 2,28 | 71.048.114,17 |
| KABUPATEN JEPARA | 2010 | 1,12 | 77.516 | 4,56 | 13.347.321,26 |
| KABUPATEN JEPARA | 2011 | 1,3 | 191.515 | 5,48 | 14.004.325,03 |
| KABUPATEN JEPARA | 2012 | 0,94 | 212.173 | 4,29 | 14.824.995,87 |
| KABUPATEN JEPARA | 2013 | 1,12 | 186.956 | 6,34 | 15.623.738,87 |
| KABUPATEN JEPARA | 2014 | 1,17 | 190.017 | 5,09 | 16.374.715,21 |
| KABUPATEN JEPARA | 2015 | 1,28 | 186.172 | 3,12 | 17.210.365,92 |
| KABUPATEN JEPARA | 2016 | 0,68 | 308.356 | 0 | 18.080.634,88 |
| KABUPATEN JEPARA | 2017 | 0,98 | 362.662 | 2,97 | 19.054.540,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN JEPARA | 2018 | 0,71 | 361.391 | 3,24 | 20.169.685,17 |
| KABUPATEN DEMAK | 2010 | 3,75 | 90.284 | 5,69 | 11.647.735,65 |
| KABUPATEN DEMAK | 2011 | 3,12 | 200.546 | 5,03 | 12.275.702,69 |
| KABUPATEN DEMAK | 2012 | 2,75 | 314.747 | 8,4 | 12.823.227,04 |
| KABUPATEN DEMAK | 2013 | 2,19 | 295.427 | 7,08 | 13.499.226,47 |
| KABUPATEN DEMAK | 2014 | 1,9 | 304.806 | 5,17 | 14.078.419,80 |
| KABUPATEN DEMAK | 2015 | 2,32 | 382.085 | 6,02 | 14.912.999,60 |
| KABUPATEN DEMAK | 2016 | 2,2 | 463.674 | 0 | 15.672.482,50 |
| KABUPATEN DEMAK | 2017 | 2,2 | 365.909 | 4,93 | 16.584.027,68 |
| KABUPATEN DEMAK | 2018 | 2,09 | 346.045 | 6,06 | 17.474.052,00 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2010 | 1,45 | 66.081 | 6,25 | 21.572.136,87 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2011 | 1,6 | 129.986 | 6,16 | 22.925.456,80 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2012 | 1,57 | 227.370 | 4,87 | 24.306.718,35 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2013 | 0,92 | 245.413 | 3,9 | 25.758.121,08 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2014 | 1,2 | 248.224 | 4,38 | 27.264.112,96 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2015 | 1,33 | 213.098 | 2,57 | 28.768.327,30 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2016 | 1,57 | 321.386 | 0 | 30.292.468,04 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2017 | 1,1 | 285.714 | 5,82 | 32.004.085,35 |
| KABUPATEN SEMARANG | 2018 | 1,51 | 342.938 | 4,23 | 33.857.648,85 |
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2010 | 1,73 | 84.517 | 3,6 | 9.710.199,27 |
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2011 | 1,93 | 73.070 | 3,54 | 10.301.569,79 |
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2012 | 1,85 | 94.994 | 3,39 | 10.740.983,02 |
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2013 | 1,46 | 204.630 | 4,87 | 11.299.342,97 |
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2014 | 1,51 | 242.912 | 3,19 | 11.867.679,59 |
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2015 | 1,99 | 305.691 | 1,5 | 12.489.394,54 |
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2016 | 1,7 | 344.075 | 0 | 13.116.363,64 |
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2017 | 1,81 | 429.268 | 4,39 | 13.754.614,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN TEMANGGUNG | 2018 | 1,36 | 226.739 | 4,41 | 14.452.019,21 |
| KABUPATEN KENDAL | 2010 | 3,48 | 66.394 | 5,57 | 18.798.278,37 |
| KABUPATEN KENDAL | 2011 | 2,21 | 181.778 | 6,54 | 20.032.434,32 |
| KABUPATEN KENDAL | 2012 | 1,59 | 224.223 | 6,31 | 21.075.717,33 |
| KABUPATEN KENDAL | 2013 | 1,95 | 245.669 | 6,43 | 22.386.123,50 |
| KABUPATEN KENDAL | 2014 | 1,76 | 233.829 | 6,15 | 23.536.834,39 |
| KABUPATEN KENDAL | 2015 | 2,17 | 244.084 | 7,07 | 24.762.325,36 |
| KABUPATEN KENDAL | 2016 | 2,13 | 306.535 | 0 | 26.139.414,95 |
| KABUPATEN KENDAL | 2017 | 1,69 | 322.274 | 5,59 | 27.665.643,32 |
| KABUPATEN KENDAL | 2018 | 1,85 | 291.280 | 6,21 | 29.186.390,49 |
| KABUPATEN BATANG | 2010 | 2,29 | 27.888 | 6,48 | 9.447.328,38 |
| KABUPATEN BATANG | 2011 | 2,07 | 72.568 | 6,66 | 10.025.044,65 |
| KABUPATEN BATANG | 2012 | 1,89 | 245.669 | 5,88 | 10.488.456,63 |
| KABUPATEN BATANG | 2013 | 1,93 | 158.486 | 7,02 | 11.104.696,78 |
| KABUPATEN BATANG | 2014 | 1,43 | 182.270 | 7,42 | 11.693.897,06 |
| KABUPATEN BATANG | 2015 | 1,8 | 228.389 | 4,56 | 12.328.239,23 |
| KABUPATEN BATANG | 2016 | 1,65 | 282.724 | 0 | 12.948.191,13 |
| KABUPATEN BATANG | 2017 | 1,51 | 234.030 | 7,33 | 13.666.579,80 |
| KABUPATEN BATANG | 2018 | 1,08 | 129.829 | 8,45 | 14.448.522,77 |
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2010 | 2,4 | 74.335 | 4,04 | 10.254.315,35 |
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2011 | 2,08 | 96.333 | 6,91 | 10.834.201,09 |
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2012 | 1,49 | 160.583 | 5,08 | 11.354.849,90 |
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2013 | 1,96 | 201.327 | 4,78 | 12.034.805,89 |
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2014 | 1,79 | 205.843 | 6,03 | 12.630.368,82 |
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2015 | 1,98 | 227.713 | 5,1 | 13.234.564,04 |
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2016 | 1,94 | 288.929 | 0 | 13.921.651,83 |
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2017 | 1,73 | 298.685 | 8,04 | 14.679.128,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN PEKALONGAN | 2018 | 1,4 | 434.427 | 7,27 | 15.524.820,69 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2010 | 3,19 | 45.695 | 11,45 | 11.282.196,10 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2011 | 3,09 | 95.000 | 7,37 | 11.847.199,06 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2012 | 2,51 | 205.884 | 4,85 | 12.477.235,25 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2013 | 2,71 | 288.005 | 6,48 | 13.172.063,61 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2014 | 2,49 | 170.488 | 7,44 | 13.898.669,42 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2015 | 3,93 | 283.606 | 6,53 | 14.673.696,23 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2016 | 3,04 | 97.723 | 0 | 15.469.800,59 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2017 | 3,52 | 273.717 | 6,68 | 16.343.954,00 |
| KABUPATEN PEMALANG | 2018 | 2,96 | 288.308 | 4,88 | 17.286.696,64 |
| KABUPATEN TEGAL | 2010 | 1,78 | 96.233 | 7,48 | 15.106.509,91 |
| KABUPATEN TEGAL | 2011 | 1,89 | 175.032 | 10,59 | 16.071.820,41 |
| KABUPATEN TEGAL | 2012 | 1,14 | 287.340 | 6,12 | 16.912.249,74 |
| KABUPATEN TEGAL | 2013 | 1,68 | 222.910 | 6,89 | 18.050.291,97 |
| KABUPATEN TEGAL | 2014 | 1,33 | 298.329 | 8,47 | 18.958.841,04 |
| KABUPATEN TEGAL | 2015 | 1,5 | 335.924 | 9,52 | 19.999.475,45 |
| KABUPATEN TEGAL | 2016 | 1,03 | 617.150 | 0 | 21.182.917,23 |
| KABUPATEN TEGAL | 2017 | 1,27 | 408.152 | 4,47 | 22.322.100,13 |
| KABUPATEN TEGAL | 2018 | 1,41 | 507.203 | 4,39 | 23.552.548,37 |
| KABUPATEN BREBES | 2010 | 4,27 | 163.445 | 8,21 | 20.158.107,77 |
| KABUPATEN BREBES | 2011 | 4,25 | 234.397 | 11,08 | 21.498.422,48 |
| KABUPATEN BREBES | 2012 | 3,07 | 284.055 | 8,22 | 22.482.262,67 |
| KABUPATEN BREBES | 2013 | 3,33 | 403.345 | 9,61 | 23.812.056,92 |
| KABUPATEN BREBES | 2014 | 2,93 | 254.546 | 9,53 | 25.074.171,51 |
| KABUPATEN BREBES | 2015 | 3,52 | 356.274 | 6,49 | 26.572.834,89 |
| KABUPATEN BREBES | 2016 | 3,96 | 611.331 | 0 | 27.930.986,28 |
| KABUPATEN BREBES | 2017 | 3,06 | 526.403 | 3,96 | 29.527.028,83 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN BREBES | 2018 | 3,51 | 402.012 | 4,28 | 31.094.896,54 |
| KOTA MAGELANG | 2010 | 1,61 | 43.937 | 13,28 | 4.010.718,18 |
| KOTA MAGELANG | 2011 | 1,61 | 66.479 | 11,51 | 4.255.662,21 |
| KOTA MAGELANG | 2012 | 1,48 | 123.517 | 8,99 | 4.484.268,08 |
| KOTA MAGELANG | 2013 | 1,45 | 122.368 | 6,75 | 4.755.092,20 |
| KOTA MAGELANG | 2014 | 0,94 | 121.709 | 7,38 | 4.992.112,82 |
| KOTA MAGELANG | 2015 | 1,39 | 141.523 | 6,43 | 5.247.341,27 |
| KOTA MAGELANG | 2016 | 1,2 | 164.687 | 0 | 5.521.525,54 |
| KOTA MAGELANG | 2017 | 1,3 | 207.504 | 6,61 | 5.820.532,00 |
| KOTA MAGELANG | 2018 | 1,07 | 223.259 | 5,29 | 6.145.869,75 |
| KOTA SURAKATA | 2010 | 2,19 | 138.198 | 8,73 | 21.469.551,30 |
| KOTA SURAKATA | 2011 | 1,89 | 245.922 | 7,7 | 22.848.439,42 |
| KOTA SURAKATA | 2012 | 1,33 | 196.087 | 6,29 | 24.123.781,59 |
| KOTA SURAKATA | 2013 | 1,63 | 264.918 | 7,22 | 25.631.681,32 |
| KOTA SURAKATA | 2014 | 1,48 | 278.056 | 6,16 | 26.984.358,61 |
| KOTA SURAKATA | 2015 | 1,74 | 170.840 | 4,53 | 28.453.493,87 |
| KOTA SURAKATA | 2016 | 1,34 | 243.058 | 0 | 29.975.873,01 |
| KOTA SURAKATA | 2017 | 1,87 | 445.358 | 5,05 | 31.685.480,46 |
| KOTA SURAKATA | 2018 | 1,47 | 430.421 | 6,13 | 33.506.170,40 |
| KOTA SALATIGA | 2010 | 0,94 | 73.877 | 10,22 | 5.845.475,81 |
| KOTA SALATIGA | 2011 | 1,3 | 86.935 | 9,02 | 6.230.219,49 |
| KOTA SALATIGA | 2012 | 0,77 | 150.127 | 6,84 | 6.574.907,26 |
| KOTA SALATIGA | 2013 | 0,94 | 163.571 | 6,21 | 6.989.045,50 |
| KOTA SALATIGA | 2014 | 0,87 | 185.328 | 4,46 | 7.378.042,82 |
| KOTA SALATIGA | 2015 | 1,07 | 190.396 | 6,43 | 7.759.181,62 |
| KOTA SALATIGA | 2016 | 0,6 | 246.307 | 0 | 8.168.241,90 |
| KOTA SALATIGA | 2017 | 0,85 | 185.737 | 8,19 | 8.629.396,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTA SALATIGA | 2018 | 0,69 | 182.415 | 7,94 | 9.104.841,00 |
| KOTA SEMARANG | 2010 | 0,89 | 194.957 | 8,98 | 80.824.099,97 |
| KOTA SEMARANG | 2011 | 0,71 | 338.249 | 7,65 | 86.142.966,70 |
| KOTA SEMARANG | 2012 | 0,8 | 424.037 | 6,01 | 91.282.029,07 |
| KOTA SEMARANG | 2013 | 0,65 | 719.171 | 6,02 | 96.985.402,04 |
| KOTA SEMARANG | 2014 | 0,47 | 804.094 | 7,76 | 103.109.874,91 |
| KOTA SEMARANG | 2015 | 0,5 | 990.118 | 5,77 | 109.110.689,61 |
| KOTA SEMARANG | 2016 | 0,76 | 1.151.483 | 0 | 115.542.560,57 |
| KOTA SEMARANG | 2017 | 0,54 | 1.341.969 | 6,61 | 123.107.015,15 |
| KOTA SEMARANG | 2018 | 0,58 | 1.611.808 | 5,29 | 131.137.259,65 |
| KOTA PEKALONGAN | 2010 | 1,11 | 42.395 | 7 | 4.624.260,08 |
| KOTA PEKALONGAN | 2011 | 1,37 | 75.889 | 8,06 | 4.878.332,22 |
| KOTA PEKALONGAN | 2012 | 1,09 | 104.503 | 7,67 | 5.151.813,52 |
| KOTA PEKALONGAN | 2013 | 0,93 | 118.778 | 5,28 | 5.456.196,88 |
| KOTA PEKALONGAN | 2014 | 1,14 | 147.375 | 5,42 | 5.755.282,26 |
| KOTA PEKALONGAN | 2015 | 0,83 | 174.509 | 4,1 | 6.043.095,73 |
| KOTA PEKALONGAN | 2016 | 0,8 | 200.867 | 0 | 6.367.272,96 |
| KOTA PEKALONGAN | 2017 | 0,92 | 223.329 | 5,05 | 6.706.278,70 |
| KOTA PEKALONGAN | 2018 | 1,01 | 177.208 | 6,13 | 7.087.915,58 |
| KOTA TEGAL | 2010 | 1,72 | 60.553 | 14,22 | 6.895.713,33 |
| KOTA TEGAL | 2011 | 1,89 | 97.061 | 9,77 | 7.341.540,16 |
| KOTA TEGAL | 2012 | 0,95 | 86.188 | 8,75 | 7.650.479,56 |
| KOTA TEGAL | 2013 | 0,94 | 116.631 | 9,32 | 8.084.175,73 |
| KOTA TEGAL | 2014 | 1,38 | 127.352 | 9,2 | 8.491.325,37 |
| KOTA TEGAL | 2015 | 1,34 | 174.614 | 8,06 | 8.953.879,56 |
| KOTA TEGAL | 2016 | 1,04 | 269.539 | 0 | 9.445.030,96 |
| KOTA TEGAL | 2017 | 1,42 | 258.191 | 8,19 | 10.006.893,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTA TEGAL | 2018 | 1,23 | 140.883 | 7,94 | 10.599.407,23 |

## Lampiran II: Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel | Mean | Std. Dev. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| KMIS | 2.098 | 0.912055 | 0.47 | 4.74 |
| BM | 259283.6 | 175787.1 | 27888 | 1611808 |
| TPT | 5.614825 | 2.032285 | 1.5 | 14.22 |
| PDRB | 22063290 | 20950643 | 4010718 | 131000000 |

## Lampiran III: Hasil Estimasi Regresi Data Panel

### 1. Model Common Effect

Dependent Variable: KMIS
Method: Panel Least Squares
Date: 11/08/21 Time: 15:46
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 315

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 6.013575 | 1.376868 | 4.367574 | 0.0000 |
| LOG(BM) | -0.152595 | 0.097655 | -1.562582 | 0.1192 |
| TPT | -0.047128 | 0.025919 | -1.818271 | 0.0700 |
| LOG(PDRB) | -0.106742 | 0.093676 | -1.139478 | 0.2554 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.030956 | Mean dependent var | 2.098000 |
| Adjusted R-squared | 0.021608 | S.D. dependent var | 0.912055 |
| S.E. of regression | 0.902147 | Akaike info criterion | 2.644538 |
| Sum squared resid | 253.1133 | Schwarz criterion | 2.692190 |
| Log likelihood | -412.5148 | Hannan-Quinn criter. | 2.663577 |
| F-statistic | 3.311584 | Durbin-Watson stat | 0.241255 |
| Prob(F-statistic) | 0.020391 | | |

### 2. Model Fixed Effect

Dependent Variable: KMIS
Method: Panel Least Squares

Date: 08/28/21 Time: 10:33
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 315

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 20.20535 | 3.605133 | 5.604607 | 0.0000 |
| LOG(BM) | -0.101616 | 0.060505 | -1.679454 | 0.0942 |
| TPT | -0.011840 | 0.014212 | -0.833085 | 0.4055 |
| LOG(PDRB) | -1.008276 | 0.248708 | -4.054047 | 0.0001 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.889959 | Mean dependent var | 2.098000 |
| Adjusted R-squared | 0.875261 | S.D. dependent var | 0.912055 |
| S.E. of regression | 0.322124 | Akaike info criterion | 0.684952 |
| Sum squared resid | 28.74253 | Schwarz criterion | 1.137644 |
| Log likelihood | -69.87998 | Hannan-Quinn criter. | 0.865820 |
| F-statistic | 60.54724 | Durbin-Watson stat | 1.982548 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

## 3. Model Random Effect

Dependent Variable: KMIS
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 11/08/21 Time: 15:49
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 315
Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 13.17916 | 2.538538 | 5.191635 | 0.0000 |
| LOG(BM) | -0.189718 | 0.050832 | -3.732222 | 0.0002 |
| TPT | -0.004805 | 0.013735 | -0.349800 | 0.7267 |
| LOG(PDRB) | -0.523868 | 0.174785 | -2.997212 | 0.0029 |

Effects Specification

| | S.D. | Rho |
|---|---|---|
| Cross-section random | 0.844404 | 0.8730 |
| Idiosyncratic random | 0.322124 | 0.1270 |

Weighted Statistics

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.218989 | Mean dependent var | 0.264651 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adjusted R-squared | 0.211455 | S.D. dependent var | 0.367733 |
| S.E. of regression | 0.326547 | Sum squared resid | 33.16293 |
| F-statistic | 29.06727 | Durbin-Watson stat | 1.749874 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

## Lampiran VI: Pemilihan Model Regresi Panel

### 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_EFFECT
Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section F | 63.597786 | (34,277) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 685.269592 | 34 | 0.0000 |

### 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RE
Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section random | 11.600655 | 3 | 0.0089 |

## Lampiran V: Hasil Estimasi Regresi Data Panel Menggunakan Model Fixed Effect

Dependent Variable: KMIS
Method: Panel Least Squares
Date: 08/28/21 Time: 10:33
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 315

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| C | 20.20535 | 3.605133 | 5.604607 | 0.0000 |
| LOG(BM) | -0.101616 | 0.060505 | -1.679454 | 0.0942 |
| TPT | -0.011840 | 0.014212 | -0.833085 | 0.4055 |
| LOG(PDRB) | -1.008276 | 0.248708 | -4.054047 | 0.0001 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.889959 | Mean dependent var | 2.098000 |
| Adjusted R-squared | 0.875261 | S.D. dependent var | 0.912055 |
| S.E. of regression | 0.322124 | Akaike info criterion | 0.684952 |
| Sum squared resid | 28.74253 | Schwarz criterion | 1.137644 |
| Log likelihood | -69.87998 | Hannan-Quinn criter. | 0.865820 |
| F-statistic | 60.54724 | Durbin-Watson stat | 1.982548 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |